

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Globalisasi ditengarai menyebar ke segala aspek kehidupan ditandai dengan masuknya pemikiran dan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan agar diterima sebagai bagian dari masyarakat dunia adalah memiliki keterampilan sosial dan siap berkompetisi tanpa membedakan ras, agama, dan gender. Di era global, perempuan semakin berpeluang dan memperoleh akses untuk terlibat aktif dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Penggambaran peran sosial pada situasi global yang tidak lagi mendasarkan pada jenis kelamin dan prestasi menjadi penentu utama kesuksesan individu. Kajian feminisme menyebut partisipasi perempuan menyiratkan gerak dinamis perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik yang sangat kompleks. Asumsi yang muncul menunjukkan hasil kuatnya budaya patriarki menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi dalam berbagai akses kehidupan sosial yang ada sebagaimana dialami perempuan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Konsep patriarki menggarisbawahi istilah perempuan secara langsung menunjuk pada salah satu dari dua jenis kelamin selain laki-laki. Perempuan dalam kehidupan sosial yang terkungkung dalam budaya patriarki dipandang sebagai *the other sex* (Abdullah, 2006, hlm. 3). Secara alamiah, di satu sisi laki-laki dianggap mendominasi, berorientasi hierarkhis pada kekuasaan. Di sisi lain, perempuan dianggap sebagai pemelihara, pengasuh anak dan berorientasi rumah tangga. Artinya, perempuan selalu dikaitkan dengan tubuh yang mampu melahirkan yang mendorong munculnya nilai-nilai *egaliter* berbasis pengasuhan.

Relasi sosial laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana *less powerfull* atau berkemampuan kurang untuk perempuan serta *more powerfull* atau berkemampuan lebih bagi laki-laki. Laki-laki dianggap memiliki kemampuan lebih sehingga perempuan dipandang lebih rendah. Meski

secara simbolik kadangkala perempuan lebih tinggi daripada laki-laki namun sesungguhnya simbolisasi terhadap perempuan sangat sering dimanfaatkan oleh laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dalam interaksi sosial. Jadi, patriarki secara umum diidentikkan dengan kekuasaan laki-laki sebagai instrument untuk mendominasi perempuan dalam berbagai cara.

Konteks dunia materialistis memiliki asumsi bahwa perempuan bukan hanya menerima status subordinasi namun juga feminisasi kemiskinan dan maskulinisasi kekayaan. Akses yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari ciri-ciri gender atau analogi anatominya tapi dalam kenyataan keterlibatan perempuan pada aktivitas tertentu cenderung menjadi tidak menonjol. Sistem patriarki yang mengandung nilai mengutamakan laki-laki, mempengaruhi cara perempuan dan laki-laki dalam mempersepsikan status dan perannya dalam keluarga dan masyarakat serta menentukan citra masing-masing jenis kelamin dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Ketimpangan konstruksi sosial laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dewasa ini menjadi realitas yang diawali dari perbedaan jenis kelamin dan melahirkan masalah ketidakadilan. Fakhri (2005, hlm. 24) menjelaskan manifestasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya asumsi perbedaan jenis kelamin dan peran gender sebagai berikut.

1. Terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan.
2. Terjadi subordinasi terhadap kaum perempuan yaitu perempuan tidak dianggap sebagai sosok penting dalam aktifitas sosial dan pembangunan.
3. Muncul pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap perempuan yang akan membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan perempuan. Pada stereotipe ini perempuan pencari nafkah dianggap sebagai pekerjaan tambahan.
4. Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Kekerasan yang dialami perempuan dimulai dari kekerasan fisik dan psikologis serta penciptaan ketergantungan.
5. *Double burden* bagi perempuan. Perempuan menjadi pengelola rumah tangga, banyak perempuan menanggung beban kerja rumah tangga lebih lama.

Keseluruhan manifestasi ketidakadilan gender terus berkaitan dan secara dialektis saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan tersebut tersosialisasikan secara kuat dan menyebar melalui berbagai akses yang terus menerus intens pada laki-laki dan perempuan sehingga menjadi kebiasaan dan pada akhirnya kedua pihak (laki-laki dan perempuan) mempercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah menjadi kodrat. Akhirnya, tercipta sebuah struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan sudah tidak dapat lagi dianggap sebagai kesalahan. Pendiskriminasian terhadap kaum perempuan bahkan seringkali berbalut dengan penghormatan. Perempuan hanya mampu mengamini segala tindakan ini.

Kajian feminisme Muslim, Engineer (2003, hlm. 1-2), menyatakan perempuan harus berperan aktif dalam pendidikan agar mencapai kemandirian. Aspek latar belakang historis menyebutkan bahwa setelah perang dunia kedua secara alami semakin banyak perempuan yang bekerja. Perempuan dibebaskan dari pekerjaan rumah tangga dan mulai dipekerjakan di luar rumah. Semakin banyak perempuan bekerja di luar rumah menjadi bukti, perempuan semakin terbuka wawasannya. Mereka juga kurang tergantung kepada laki-laki dan lebih mandiri. Perempuan yang berpendidikan juga semakin bertambah. Akibatnya, semakin bertambah pula kesempatan perempuan untuk mengisi lapangan pekerjaan. Kondisi ini hanya muncul di negara pemenang Perang Dunia II sementara di negara berkembang kaum perempuan harus memikul beban berat. Banyak janda yang menjadi korban perang, harus menanggung beban domestik sehingga menanggukkan keinginannya untuk bersekolah.

Kondisi ini tersosialisasikan dengan baik melalui pewarisan perilaku budaya/tradisi yang diperkuat oleh media massa dan nilai keyakinan (agama). Agama-agama Ibrahim (*Abrahamic Religions*) terutama Islam sering dianggap sebagai salah satu faktor yang menjustifikasi paham patriarki yang bias gender. Agama dipandang terlalu bersifat maskulin dan patriarkhal sehingga sering mengabaikan aspek femininitas dan peran perempuan baik secara ritual maupun

institusional. Wacana gender tidak dapat dilepaskan dari persoalan teologis karena memang posisi perempuan dalam beberapa pemikiran agama ditempatkan sebagai *the second*, terutama dalam persoalan asal usul kejadian laki-laki dan perempuan, juga persoalan fungsi keberadaan keduanya (Engineer, 2003, hlm. 10-11).

Pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri atau justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur (Arab) patriarkhi ataupun pandangan-pandangan lainnya. Penelusuran ajaran-ajaran Islam yang autentik, di mana Islam sejak awal, memiliki konsep yang sangat matang dalam memposisikan perempuan yang didasari atas tuntunan moral dasar Islam itu sendiri yang ditercantumkan baik di dalam Al Quran maupun hadits, justru di saat agama-agama lain hingga saat ini masih berselisih pendapat dalam menetapkan hukum perempuan dan kemanusiaannya.

Masyarakat di negara-negara berkembang masih mempertahankan patriarkhi, sehingga prioritas pilihan terhadap anak laki-laki lebih diutamakan. Sikap sosial ini sangat mengakar terutama di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Keluarga petani sangat memerlukan bantuan selama masa sibuk dan sangat mungkin menarik anak perempuannya dari sekolah dari sekolah dibandingkan dengan anak laki-lakinya. Ia berharap anak perempuan ikut memikul beban rumah tangga. Anak perempuan sering absen dari sekolah selama kurun waktu bulanan karena kebiasaan sosial menuntutnya atau karena alasan praktis yang sederhana. Perkawinan dan menjadi ibu terlalu dini menjadi faktor sosial lainnya yang menghambat anak perempuan menyelesaikan pendidikannya (Mosse, 2004, hlm.102). Gadis-gadis yang tetap bersekolah, sekolah akan menentukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai perempuan dan ini menjadi faktor utama di mana pendidikan lebih mendukung ketidakadilan gender daripada menolaknya.

Sebagian besar pendidikan yang ditawarkan kepada anak perempuan menjadi pedang bermata dua di mana pendidikan itu memperkuat dan mempertinggi

perasaan mereka mengenai kekurangannya sebagai gadis. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa pada umumnya ditemukan banyak informasi yang tidak memadai atau tidak tepat mengenai kurikulum pendidikan, pengaruhnya lebih bersifat merusak pada anak perempuan daripada terhadap anak laki-laki. Kate Young (1993, hlm. 16) menjelaskan keadaan ini disebabkan oleh pembentukan stereotipe yang ditemukan dalam literatur sekolah. Harapan dan model yang dibangun dalam kurikulum pendidikan cenderung bersifat prasangka kepada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Anak perempuan seringkali ditawari kurikulum pendidikan yang terbatas yang lebih menekankan pengetahuan kerumahtanggaan dan kemampuan keperempuanan lainnya (misalnya: menjahit, memasak, kerajinan tangan, menyulam, merancang busana, dan lain-lain) daripada sains dan mata pelajaran teknik (otomotif, elektronik, mesin perkakas, dan lain-lain).

Bias *inheren* dalam kurikulum pendidikan ditambah dengan persoalan tidak adanya model peran yang memadai bagi anak perempuan di luar tingkat pendidikan tertentu dan harapan yang dimiliki orang tua, guru, dan anak perempuan itu sendiri, menjadi hal yang tidak sulit untuk memahami bahwa pendidikan lebih mengekalkan peran gender daripada menolaknya. Sebagian besar guru sendiri tidak menyadari diskriminasi yang dihadapi perempuan sebagai gender dan mereka tidak mampu menolak stereotipe yang bersifat merusak dalam materi pendidikan, pilihan karier yang tersedia bagi anak perempuan dan lingkungan pendidikan yang melakukan diskriminasi semata-mata karena mereka tidak memahaminya.

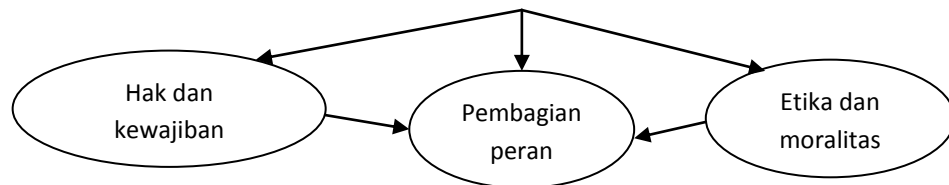
Salah satu akibat dari cara pendidikan konvensional yang cenderung memperkuat stereotipe sosial adalah semakin banyaknya jumlah anak perempuan yang *drop out* (putus sekolah) pada saat mereka menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jenis pendidikan ini melupakan perempuan, gagal mempersiapkan kaum perempuan kecuali perannya sebagai istri dan ibu. Kondisi masyarakat secara jelas dan nyata menunjukkan bagaimana peran gender

dikonstruksi dari tumpukan bangunan besar di mana semua manusia dilahirkan, namun kelas, warna kulit, agama, kasta, dan kebangsaan memiliki peranan besar yang memutuskan secara tepat tentang kesempatan hidup apa yang dimiliki perempuan, dalam hubungannya dengan laki-laki dari latar belakang yang sama.

Perempuan hanya dianggap siapapun yang bisa menjadi ibu dan menyusui anak-anaknya, akan tetapi kemampuan biologis atau alami ini seringkali berarti bahwa semua pekerjaan perempuan dalam mempertahankan kehidupan dari mengasuh anak-anak, mengumpulkan bahan bakar dan air, menanam bahan pangan untuk keluarga, menjual kelebihan makanan, dan merawat mereka yang sakit dan tua lebih dipandang sebagai sesuatu yang alami daripada kerja, seperti kerja yang dilakukan oleh laki-laki. Perspektif yang keliru mengenai arti penting dari apa yang dilakukan perempuan mengandung arti bahwa dalam proses pendidikan perempuan seringkali tidak tampak. Gambaran yang tidak benar dan jelas disebabkan dalam lembaga pendidikan tinggi, mayoritas mahasiswa perempuan dikenal rajin, konsen pada perkuliahan, menjadi lulusan terbaik dalam tiap wisuda dan dikenal aktif terlibat langsung dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Wadud (2006, hlm. 52) menyarankan hal yang harus dilakukan perempuan modern saat ini adalah membangun relasi fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial yang didasarkan pada semangat Al Qur'an. Pengembangan konsep diri (potensi individu) dilakukan demi kemajuan hidup manusia. Kesetaraan individu merupakan kunci dalam mencapai kemajuan tersebut. Wadud (2006, hlm. 74) menyebut beberapa aspek penting dalam menentukan relasi gender dalam kehidupan sosial. *Pertama*, perspektif yang lebih adil dalam hak dan kewajiban individu baik laki-laki ataupun perempuan di dalam masyarakat. *Kedua*, dalam pembagian peran tersebut mencakup keadilan sosial, penghargaan atau martabat manusia, persamaan hak di hadapan Allah dan keharmonisan dengan alam. *Ketiga*, relasi gender hendaknya secara gradual turut membentuk etika dan moralitas bagi manusia. Ketiga aspek relasi gender ini

menjadi prinsip utama sebuah ‘relasi fungsional’ yang tujuannya tidak lain adalah merealisasikan misi penciptaan manusia di dunia, yaitu *khalifah fi al-ardi*.



**Gambar 1.1.**  
**Relasi Gender Menurut Aminah Wadud**

Konteks ini menjelaskan paradigma ” wanita adalah pilar negara, jika ia baik maka negara akan menjadi baik dan bila ia buruk negara akan menjadi buruk “ menjadi menemukan relevansinya (Wadud, 2006, hlm. 141). Pilar negara berarti menjadi subjek aktif yang bermanfaat untuk menentukan nasib bangsa. Perempuan itu adalah pembawa peradaban, bahwa dari perempuan itu mungkin timbul pengaruh yang besar, dalam hal memperbaiki maupun memburukkan kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak membantu memajukan kesucilaan manusia.

Upaya mewujudkan sebuah tatanan kehidupan yang beradab, kaum perempuan harus berani mengambil peran strategis sebagai “oposan loyal.” Oposisi loyal bukan bermakna asal “tampil beda” atau mengambil posisi diametral dan kontraversial yang menjadikan laki-laki sebagai “musuh” atau “lawan” yang *vis a vis* dengan dirinya. Gerakan memfungsikan kefemininitas sebagai simbol nilai-nilai kelembutan yang persuasif bagi kepentingan *nahi mungkar* agar kaum laki-laki tidak menggunakan energi kemaskulinannya (kekuatannya) untuk membuat kerusakan (*fasad*) tetapi justru untuk melindungi nilai-nilai humanisme dan kebenaran. Peradaban manusia modern semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi dan mengeksploitasi.

Masyarakat patriarkhi Indonesia mengindikasikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan adanya perbedaan gender, yaitu perbedaan peran, perilaku, dan pencitraan terhadap perempuan yang diciptakan oleh masyarakat melalui melalui proses budaya yang panjang. Keluarga Indonesia pada umumnya orang tua atau orang-orang terdekat lainnya secara langsung maupun tidak langsung telah mensosialisasikan peran anak laki-laki dan perempuan secara berbeda. Anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal-hal tertentu saja, bahkan seringkali diberi kebebasan untuk bermain dan tidak diberi tanggung jawab tertentu dalam urusan rumah tangga. Anak perempuan diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan rumah tangga, misalnya: membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyapu, menjaga adik, merawat orang sakit, berbelanja kebutuhan dapur dan sebagainya. Hal-hal semacam ini secara tidak sengaja telah mengarahkan anak laki-laki berbeda perannya dengan anak perempuan.

Bidang pendidikan anak perempuan mengalami marginalisasi yang sangat mendasar. Biaya pendidikan yang membebani orang tua siswa setiap tahunnya semakin bertambah mahal, sehingga bagi kalangan siswa dari keluarga miskin, sekolah semakin sebatas menjadi impian. Pemanfaatan fasilitas pendidikan berkualitas semakin tidak memungkinkan. Banyak anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, melanjutkan studinya di sekolah yang kualitasnya di bawah standar, yang penting biaya terjangkau oleh pendapatan orang tua mereka. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh arus komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi komoditi yang ditawarkan kepada siswa (orang tua siswa) dengan berbagai variasi biaya. Pendidikan berkategori unggulan biayanya tentu saja setinggi langit. Banyak sekolah unggulan yang mematok biaya pendidikan yang mahal. Diawali SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) yang bernilai jutaan rupiah, biaya seragam, ekstrasurikuler, buku teks wajib mapel, sampai biaya lain-lain yang seharusnya tidak menjadi beban orang tua siswa.



Dampak laju komersialisasi pendidikan lambat laun membuat diskriminasi hak memperoleh fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hak untuk menikmati pendidikan yang berbiaya murah dan berkualitas adalah merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia, hak sosial-ekonomi-budaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah Indonesia yang telah mengikrarkan diri untuk berkomitmen pada program MDGs (*Millenium Development Goals*) memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi upaya pencapaian pendidikan dasar bagi anak-anak usia sekolah. Hak memperoleh fasilitas pendidikan harus dijamin melalui subsidi negara secara berkelanjutan melalui alokasi anggaran negara yang layak dan *feasible*.

Filosofi UU No 12 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) yang menjadikan dunia pendidikan bukan lagi sepenuhnya tanggung-jawab negara, menjadikan negara seolah lepas tangan atas tanggung jawabnya dalam mensubsidi biaya pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan justru dilepas sebagai "kewajiban" masyarakat untuk andil dalam pembiayaannya. Tidak mengherankan alokasi anggaran pendidikan di Indonesia yang dipatok dalam APBN masih belum memenuhi batas minimal 20 persen. Minimnya alokasi anggaran negara untuk program pendidikan memang akan menyebabkan dampak buruk bagi komitmen fasilitasi hak anak-anak miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, akan semakin banyak anak usia sekolah yang *drop-out* atau tidak meneruskan bangku sekolah lanjutan karena minimnya anggaran pendidikan. *Education Watch* (2006), menyebutkan bahwa kecenderungan realitas *drop-out* atau tidak meneruskan sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin semakin meningkat persentasenya.

Data anak-anak dari keluarga miskin yang *Drop Out* ketika duduk di bangku SD meningkat menjadi 24 persen, sedangkan yang tidak melanjutkan ke bangku sekolah menengah pertama menjadi 21,7 persen. Sementara itu, anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang DO ketika memasuki bangku usia sekolah menengah mencapai 18,3 persen dan yang tidak meneruskan jenjang bangku pendidikan sekolah menengah atas dari sekolah menengah pertama mencapai 29,5

persen. Sebagian besar anak usia sekolah dari keluarga miskin yang gagal melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP atau dari SMP ke SMA, mayoritas 72,3 persen adalah siswa perempuan. Anak-anak perempuan usia sekolah banyak yang DO atau tidak meneruskan sekolah karena minimnya biaya pendidikan dari keluarga dan masih terjerat cara pandang patriarkhis orang tua.

Orang tua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin, menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan sekolah, lebih baik langsung dinikahkan atau didorong untuk bekerja di sektor publik sebagai PRT (pembantu rumah tangga) atau buruh informal. Kondisi demikian yang menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak sosial ekonomi budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh (menikmati) pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah. Analoginya, andaikata anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin bisa meneruskan studi sampai jenjang sekolah menengah, mereka terpuruk menjadi pekerja sektor informal berupah murah.

Aspek kesehatan dan reproduksi juga menjadi agenda utama dalam MDGs. Mayoritas perempuan di Negara dunia ketiga termasuk Indonesia memiliki kecenderungan yang sangat buruk dalam masa kehamilan dan kelahiran. Gizi buruk ibu hamil dan pendarahan *pasca* melahirkan di Indonesia tergolong sangat tinggi dan kurang ditangani berimplikasi pada kematian ibu hamil dan melahirkan.

Aspek kekerasan menjadi persoalan baru bagi perempuan di belahan bumi manapun karena sesungguhnya kesetaraan gender masih menjadi cita-cita yang belum terwujud karena kuatnya akar patriarkhi. Kekerasan terhadap perempuan selalu terkait dengan asumsi umum yang menyebut bahwa perempuan itu lemah dan selalu didominasi oleh kekuatan pria. Jika perempuan melakukan pelanggaran peran sudah selayaknya mendapat kekerasan. Kekerasan terjadi di sektor publik maupun di sektor khusus (keluarga dan kerabat). Kekerasan di sektor publik

misalnya diskriminasi perlakuan, kekerasan di tempat-tempat pelayanan umum, kejahatan seksual dan perilaku *vandalism* yang dilakukan terhadap perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sisi lain kekerasan yang dialami perempuan dari suami, orangtua, saudara maupun siapapun yang terikat dalam hubungan kekerabatan termasuk yang dialami oleh asisten rumah tangga karena perlakuan kasar majikannya. Kekerasan dalam rumah tangga sulit dideteksi karena ada keengganan dari korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Alasannya menyangkut perasaan malu jika kasusnya ditangani oleh pihak berwenang dan menjadi konsumsi publik serta kuatnya posisi pelaku dalam rumah tangga. Pembiaran dan pemakluman terhadap tindak kekerasan menyuburkan akar patriarki yang sangat bias gender. Bahkan budaya sangat berperan melakukan kekerasan ini. Contoh yang terjadi pada masyarakat India sampai tahun 1950 menganut keyakinan yang menyebut jika suami meninggal maka istri wajib mengikuti (meninggal) melalui prosesi pembakaran mayat suaminya. Bukti kesetiaan dan ketaatan istri ditunjukkan dengan ikut sertanya perempuan mati bersama suaminya. Dalam budaya Indonesia, seperti budaya Jawa terdapat istilah *swarga nunut neraka katut* yang menjadi pelabelan pemaksaan kehendak kepada perempuan. Penafsiran atas istilah ini adalah segala peran didominasi laki-laki sementara perempuan hanya bertindak mengikutinya.

Berdasarkan hasil konsultasi pada 6 Maret 2014 dengan organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dari disabilitas, perempuan migran, perempuan adat, komunitas agama, kelompok perempuan penggiat hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, dan lain sebagainya, menghasilkan beberapa masukan penting baik dari Komnas Perempuan sendiri maupun usulan dari mitra Delegasi Republik Indonesia masuk dalam *agreed conclusion* (kesepakatan), yakni : *Pertama*, memastikan HAM, khususnya HAM perempuan menjadi dasar acuan untuk agenda pembangunan paska 2015 dan tercermin dalam dokumen *agreed conclusion*; *Kedua*, isu kekerasan terhadap perempuan harus menjadi prioritas agenda pembangunan paska 2015 dan menjadi *one stand alone*

*goal; Ketiga*, memastikan kelompok rentan dan minoritas berikut ini masuk dan diberi penekanan untuk bebas dari diskriminasi, kekerasan serta jaminan hak mereka termasuk akses keadilan, yaitu tapi tidak terbatas pada; pekerja migran, baik berdokumen atau bukan, dengan mengacu Konvensi Migran 1990 mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; pekerja rumah tangga, dengan mengacu pada Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga; perempuan dengan disabilitas dipastikan mengacu pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, antara lain memperhatikan otonomi individu, partisipasi penuh dan efektif, penyediaan infrastruktur rasional dan terakses; perempuan adat untuk bebas dari bentuk kekerasan berlapis terutama karena konflik sumberdaya alam atau kekerasan berbasis gender dan budaya; anak perempuan bebas dari kekerasan seksual, termasuk keamanan di lingkungan pendidikan; pengakuan dan dukungan bagi Perempuan pembela HAM dan keluarganya; perempuan yang bekerja di rumah tangga/domestik (*unpaid work*); perempuan dengan identitas gender dan ekspresi gender yang berbeda bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

*Keempat*, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi; hak dan kesehatan seksual dan reproduksi penting masuk dalam agenda pembangunan paska 2015, termasuk memasukkan keragaman identitas dan ekspresi gender; akses kontrasepsi berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu; pencegahan pernikahan dini untuk mencegah pemiskinan terhadap perempuan; menjamin hak pendidikan dan lingkungan yang aman bagi anak perempuan, termasuk perlindungan dari pelecehan seksual dan kekerasan di sekolah. *Kelima*, perempuan yang terkena dampak konflik dan bencana; pemulihan hak korban pelanggaran HAM masa lalu; pencegahan konflik dan pemulihan hak korban, antara lain, tapi tidak terbatas pada, konflik berbasis intoleransi agama; optimalisasi pelibatan perempuan dalam perdamaian, termasuk dalam pencegahan, transformasi konflik, dan membangun perdamaian, serta pemulihannya; penanganan bencana dan pemulihan korban serta rekonstruksi

yang ramah terhadap kebutuhan perempuan. *Keenam*, memastikan aktor non negara, khususnya korporasi untuk turut bertanggungjawab dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi yang menyendat pencapaian MDGs maupun agenda pembangunan paska 2015; *Ketujuh*, dibukanya ruang spesifik bagi *National Human Rights Institution* (NHRI) untuk bisa terlibat dalam CSW.

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akal manusia menciptakan pengetahuan sebagai alat beradaptasi dengan lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan hidup diciptakan melalui kebudayaan dengan keterampilan berpikir dan berdaya nalar, keterampilan hidup bersama, keterampilan bekerja, keterampilan pengendalian diri menjadi keterampilan dasar untuk bertahan dan menjalani kehidupan (Maryani, 2011, hlm. 17). Semua keterampilan yang dimiliki tiap orang berkembang sesuai dengan pengembangan individu. Usaha untuk mengembangkan kecakapan secara optimal dan efektif dilakukan melalui proses pendidikan.

Akses perempuan dalam bidang pendidikan dapat terlihat dalam jumlah partisipasi perempuan. Data BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa 75.69% perempuan usia 15 tahun ke atas berpendidikan tamat SMP ke bawah, di mana mayoritas perempuan hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, yakni 30.70%. Angka partisipasi sekolah perempuan secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan persentase angka partisipasi sekolah pria, tetapi terjadi hanya pada tingkat pendidikan rendah (Mosse, 2003, hlm. 20).

Tingginya tingkat pendidikan, persentase partisipasi pendidikan perempuan semakin rendah, yaitu SMA (18.59%), Diploma (2.74%), dan Universitas (3.02%) (BPS, 2009). Rendahnya pendidikan dan timpangnya kualitas pendidikan perempuan pada pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki menyebabkan daya saing perempuan di dunia kerja rendah (Mosse, 2003, hlm. 21). Proporsi terbesar dari pekerja perempuan juga diisi oleh pekerja yang hanya tamatan SD (35.03%)

sesuai dengan kisaran jumlah perempuan tamat SD (Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2009, hlm 9).

Rata-rata proporsi laki-laki dan perempuan secara nasional adalah sekitar 1:1. Jumlah angkatan kerja laki-laki kurang lebih 1,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, di mana pekerja perempuan hanya mengisi 38.23% dari total pekerja di Indonesia. Masih banyak perempuan yang belum dapat menembus dunia kerja karena lebih sedikit perempuan yang mengenyam pendidikan formal (Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2009, hlm. 12).

Idealnya, pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meraih cita-cita yang diinginkan perempuan. Rustagi (2003, hlm. 3-4), peneliti *New Delhi based Center for Women's Development Studies*, menyatakan bahwa:

Pendidikan seharusnya menjadi alat kekuasaan bagi perempuan untuk melawan ketidakadilan, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk suatu perubahan hubungan manusia dalam masyarakat secara umum. Pendidikan seharusnya memberi kesadaran tentang perilaku hubungan antar manusia dan dalam hal ini perempuan dan lelaki supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan diskriminasi satu sama lain (Rustagi, 2003, hlm. 4).

*Education For All* (2010, hlm. 1) atau Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk semua menjelaskan bahwa pendidikan dasar dikenal sebagai pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar di tingkat dasar bagi semua orang melalui berbagai sistem pendidikan di sekolah formal, pendidikan *nonformal* /sekolah alternatif bagi mereka yang memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses untuk menempuh sekolah formal (UNESCO, 2010, hlm. 1). Salah satu harapan yang digantungkan pada sistem wajib belajar sembilan tahun bagi dunia pendidikan di Indonesia adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang tidak mampu sekolah dan putus sekolah di daerah pedesaan maupun masyarakat di daerah terpencil, termasuk di dalamnya adalah keluarga pra sejahtera atau secara ekonomi tergolong orang miskin, anak-anak perempuan, dan penyandang cacat (UNESCO, 2012, hlm 11-15).

Data yang ada menunjukkan bahwa: siswa putus SD usia 7–12 tahun tercatat 762.700 orang, siswa lulus SD usia 13–15 tahun yang tidak melanjutkan ke SLTP tercatat 4.346.586 orang, siswa putus SLTP tercatat 765.000 orang, Anak usia dini yang belum terlayani tercatat 11.923.198 orang, penduduk usia sekolah tapi tidak sekolah 13,9 Juta orang (BPS, 1999, hlm.1). Jumlah itu bila ditambah dengan jumlah anak-anak pengungsi korban kerusuhan dan kekerasan di beberapa daerah akan semakin besar. Supiandi (2008, hlm 105) berpendapat:

Di Indonesia dalam batas-batas tertentu telah menunjukkan kemajuan di bidang peningkatan partisipasi anak sekolah pada tingkat Pendidikan dasar, SLTP dan SLTA, tetapi dalam perspektif gender masih menunjukkan adanya gender *gap* dalam beberapa aspek, contoh; angka buta huruf laki-laki 4,5 %, sedangkan perempuan 6,9 %, rata-rata laki-laki menghabiskan waktu untuk bersekolah 7,3 tahun, perempuan 6,1 tahun. Data-data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pendidikan sangat rendah dibanding laki-laki (Supandi, 2008, hlm. 105).

*NGO Woman Kind* (Mosse 2003, hlm. 22) mengidentifikasi tiga kendala bagi pendidikan perempuan: *pertama* iklim atau kondisi ekonomi, *kedua* sikap sosial masyarakat yang cenderung stereotipe terhadap perempuan yang bersekolah, dan *ketiga* lingkungan sekolah yang seringkali justru mendiskriminasi perempuan di sekolah.

Barclay (1974, hlm. 10) meneliti efek sikap peran gender siswa di pinggiran kota dan dalam kota melalui literatur tentang perempuan yang bekerja dan informasi karier umum tanpa mengacu pada jenis kelamin. Pengamatan Barclay terhadap perilaku dalam setiap kelompok dalam kurun waktu 15 menit selama tiga hari. Anak-anak dan kaum perempuan menyukai buku-buku yang berhubungan dengan pekerjaan perempuan. Hasilnya berguna untuk mengetahui meningkatnya jumlah pekerjaan yang sesuai bagi kaum perempuan. Kenyataannya, informasi mengenai perempuan karier, lebih mengarah pada peran kejuruan.

Sebagian besar pendidikan yang ditawarkan kepada siswa perempuan merupakan dilema, di mana pendidikan memperkuat dan mempertinggi perasaan mereka tentang kekurangannya sebagai gadis. Literatur yang tersedia

menunjukkan bahwa pada umumnya ada banyak informasi yang tidak memadai atau tidak tepat mengenai kurikulum pendidikan, pengaruhnya pada siswa perempuan yang bersifat lebih buruk daripada siswa laki-laki.

Kate Young (1993, hlm. 2-5) menjelaskan bahwa keadaan ini disebabkan oleh pembentukan stereotipe kegiatan perempuan dan laki-laki yang ditemukan dalam literatur sekolah. Harapan dan model yang dibangun dalam kurikulum pendidikan yang terbatas, yang lebih menekankan pengetahuan kerumahtanggaan dan kemampuan keperempuanan lainnya daripada sains dan mata pelajaran teknologi. *Bias inherent* dalam kurikulum pendidikan ini ditambah dengan persoalan tidak adanya model peran yang memadai bagi anak perempuan di luar tingkat pendidikan tertentu dan harapan yang dimiliki oleh orang tua, guru dan siswa perempuan, pendidikan sering lebih menekankan peran gender daripada menolaknya.

Mayoritas pendidik belum memiliki kesadaran terhadap diskriminasi yang dihadapi perempuan sebagai gender dan kadangkala pendidik tidak berani menolak stereotipe yang bersifat merusak dalam materi pendidikan, pilihan karir yang tersedia bagi anak perempuan dan lingkungan sekolah yang mungkin melakukan diskriminasi karena mereka tidak memahaminya.

*Indonesia Education for All* dalam laporan UNESCO tahun 2011 menyebutkan:

*To realize the EFA targets, policies to be taken are as follows: (1) to expand quality education access with gender perspective to all girls and boys, (2) to improve the education quality and relevance by reducing the illiterate level within the adult population mainly female population, mainly female population through the educational performance improvement, either formal or non formal streams, equivalency education programs, and adult functional literacy programs, (3) to build good governance and accountability by developing the educational institutions capacity in management and promotion with a gender perspective (UNESCO, 2011, hlm. 14).*

Program Pengarusutamaan Gender dilaksanakan oleh para pembuat peraturan, pengelola pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pendidik dan



tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua mahasiswa, dan para pemangku kebijakan di sektor pendidikan agar anak laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh akses pendidikan (Alcoff, 2003, hlm. 28-33).

EFA menjelaskan target kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut: memperluas akses pendidikan yang berkualitas dengan perspektif gender bagi semua siswa perempuan dan laki-laki, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan mengurangi tingkat buta huruf di dalam populasi orang dewasa terutama perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan. Melalui institusi formal baik formal maupun *nonformal*, program kesetaraan pendidikan, dan program keaksaraan fungsional bagi orang dewasa, dilaksanakan untuk membangun pemerintahan yang baik dan memiliki akuntabilitas dengan mengembangkan kapasitas institusi pendidikan dalam manajemen dan promosi yang berperspektif gender.

Kesetaraan Gender Rasio SD/ MI khusus ditargetkan mencapai 50,0 pada tahun 2014. Sementara itu telah mencapai 23,0 pada tahun 2011. Kondisi yang sama juga terjadi untuk Rasio Kesetaraan Gender di perguruan tinggi.

Salah seorang tokoh pendidikan Islam, Nasr (1982, hlm. 70), melihat realitas kehidupan manusia modern sebagai kehidupan yang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan menyepelkan spiritualitas. Ia mencoba memberi solusi atas keadaan manusia modern tersebut dengan mengajak kembali untuk mengingat dari mana mereka berasal dan akan kembali kepada siapa. Konsep tradisionalisme Islam di mana tradisi sendiri berarti agama adalah suatu konsep yang dikemukakan Nasr untuk mencapai gaya hidup yang sesuai dengan akar tradisi. Nasr (1982, hlm. 80-85) mengkombinasikan ilmu-ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai alat untuk lebih mengenal Tuhan agar dapat lebih dekat dengan-Nya.

Barat menjadi mode dan cermin bagi kehidupan masyarakat Islam sehingga segalanya diukur dari perspektif Barat. Akibatnya, masyarakat Islam mengalami

guncangan kultural. Mereka tidak punya identitas. Sekolah hanya mampu menciptakan perbedaan hirarki/kelas bahkan stratifikasi dalam masyarakat atau menjadi lembaga diskriminasi serta tidak bisa mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan/hak asasi manusia karena menganakemaskan sebagian kecil mahasiswa dan menggusur anak-anak kaum miskin dari proses belajar yang menguntungkan (Freire, 1998, hlm. 100-112). Pendidikan tidak membuat anak-anak *survive* dan *independen*.

Hal yang sama terungkap dari laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO yang bekerja sama dengan UNDP tahun 1998 melalui program APPEAL (*Asia Pasific Programme of Education for All*) yang mengidentifikasi bahwa pendidikan dasar saat ini tidak dirancang secara khusus untuk mengurangi kemiskinan, program-program yang ada tidak difokuskan pada keaksaraan untuk tujuan tertentu. Program ini tidak mempunyai dampak pada kelompok sasaran. Hasil penelitian itu menjelaskan bahwa susunan pembelajaran tidak diorganisasikan pada hal-hal yang berhubungan dengan orang miskin. Kurikulum yang ada sangat tidak memuat keterampilan. Isi kurikulum, seperti hak-hak anak, hak-hak perempuan, dan hak-hak manusia yang sangat diharapkan peduli dengan orang miskin sangat jarang ditemukan.

Tantangan pendidikan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu meliputi empat hal, yaitu peningkatan: pemerataan kesempatan, kualitas, efisiensi, dan relevansi. Pengenalan pendidikan kecakapan hidup (*life skills education*) pada semua jenis dan jenjang pendidikan pada dasarnya didorong oleh anggapan bahwa relevansi antara pendidikan dengan kehidupan nyata kurang erat (Anwar, 2004). Kesenjangan antara keduanya dianggap lebar, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Pendidikan makin terisolasi dari kehidupan nyata sehingga, tamatan pendidikan dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan dianggap kurang siap menghadapi kehidupan nyata. Pendidikan disebutkan relevan dengan kehidupan nyata jika sesuai dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata sangat luas

dimensi dan ragamnya, misalnya ada kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan kehidupan bangsa (Anwar, 2006, hlm. 15-23).

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Pendidikan *life skills* bagi perempuan disebut EFA dalam UNESCO (2012) sebagai berikut.

*Life skills education program is implemented to provide services for: (1) the community, especially those of productive age who do not work / unemployed, the poor and other disadvantaged people, both living in urban and rural areas, (2) members of the community who need skills improvement to have access to work or to develop their. (EFA dalam UNESCO, 2012, hlm. 12).*

Program pendidikan *life skills* dilaksanakan untuk memberikan layanan bagi: masyarakat, terutama golongan usia produktif yang tidak bekerja/ menganggur, orang-orang miskin yang kurang beruntung dan lainnya, baik yang hidup di daerah perkotaan dan pedesaan, dan anggota masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan untuk memiliki akses untuk bekerja atau untuk mengembangkan mereka.

Program pendidikan *life skills* memiliki target sebagai berikut.

*In 2014, the target of life skills through courses and training programs is 30 % of the unemployed youths and high school/vocational school graduates, poor and disadvantaged population living in urban and rural areas get Life skills program through courses and training programs. In 2011, 20 % of the life skills program graduates managed to get certitifae of competencies. In 2011, there were 50 % vocational school (SMK), have been certified with ISO 90001-2008 and there will be 100 % in 2014 as targeted (EFA dalam UNESCO, 2011, hlm. 5).*

Tahun 2014 menjadi target kecakapan hidup melalui kursus dan program pelatihan adalah 30% dari pemuda pengangguran dan lulusan SMA/ SMK, dan penduduk miskin yang kurang beruntung yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan mendapatkan Program Keterampilan Hidup melalui kursus dan program pelatihan. Tahun 2011 mengindikasikan bahwa 20% dari lulusan program

keterampilan hidup berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi. Tahun 2011 terdapat 50% sekolah kejuruan (SMK), telah disertifikasi dengan ISO 90001-2008 dan akan ada 100% pada tahun 2014 seperti yang ditargetkan.

Ilmu pengetahuan sosial menggunakan istilah globalisasi sebagai salah satu konsep penting yang diajarkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai mekanisme yang ada dan dapat menerima ragam perubahan serta kemampuan serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan yang diakibatkan oleh globalisasi. Pengembangan pembelajaran PIPS diarahkan untuk menjawab tantangan zaman. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan IPS ( Banks, 1993, hlm. 3) adalah “...for helping students to develop the knowledge, skills, attitudes, and values needed to participate in the civic life for their local community, the nation and the world.”

Pendidikan IPS menghadapi tantangan besar terkait dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu variabel yang berkontribusi besar terhadap baik buruknya kualitas pendidikan adalah unsur guru atau pendidik. Perubahan global di masyarakat dan munculnya tuntutan peningkatan kualitas menunjukkan secara garis besar IPS memiliki beberapa kekurangan. Pendidikan IPS di satu sisi masih berkuat dengan epistemologi sementara di sisi lain dibutuhkan inovasi dan solusi pada tataran praktis. Hal ini sesuai dengan tujuan utama IPS dalam menyiapkan warga negara yang mampu bertindak reflektif dan berpartisipasi di lingkungan masyarakat, bangsa dan dunia (Banks, 1990, hlm. 4). Peserta didik diharapkan mampu hidup dan bermanfaat bagi masyarakat, dapat memecahkan masalah pribadi maupun sosial, sudah selayaknya dibekali dengan *knowledge, attitudes and values, citizen action* serta *skills*. *Skill* atau kecakapan memiliki salah satu sub kajian, yaitu *life skills* atau kecakapan hidup. *Queensland School Curriculum Council* dalam Marsh (2008, hlm. 111) menyebut keterkaitan IPS dengan kecakapan hidup adalah sebagai berikut.

*This term refers to the mix of skills, knowledge and attitudes enabling people to function competently in their life roles. They extend skills initiated in*

*the first two group and include problem-solving, decision-making and social critique.*

*Studies of society and environment 'develops life skills in a number of ways, by applying the processes of investigating, creating, communicating, participating and reflecting, which enables students to function in, critique and improve the world in which they live now and in the future.*

Jurusan Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu jurusan di lingkungan perguruan tinggi Islam Negeri yang memiliki model pengembangan pembelajaran kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender yang sangat jarang dimiliki jurusan lain di lingkungan PTAIN yang cenderung konservatif dan kurang berkembang. Hal yang menjadi hambatan adalah kurangnya dukungan dari pihak lembaga dan jurusan lainnya, kurangnya sosialisasi model kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender pada jurusan lain di lingkungan IAIN Syekh Nurjati maupun jurusan sejenis di lingkungan PTAIN lainnya. Karakteristik yang menarik, dibesarkan di lingkungan yang sangat patriarkhis dan kurang menempatkan kesetaraan gender, kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender menjadi bentuk baru dalam pembelajaran di Jurusan Tadris IPS.

Aktivitas dan tujuan pendidikan kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon berupaya menyiapkan peserta didik terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang. Kecakapan hidup mahasiswa di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mencakup kecakapan dasar dan kecakapan instrumental. Anwar (2004, hlm. 45) membagi kecakapan hidup sebagai berikut.

- a. Kecakapan dasar
  - 1) kecakapan belajar mandiri;
  - 2) kecakapan membaca, menulis, dan menghitung;
  - 3) kecakapan berkomunikasi;
  - 4) kecakapan berpikir ilmiah, kritis, nalar, rasional, lateral, sistem, kreatif, eksploratif, *reasoning*, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah;
  - 5) kecakapan kalbu/personal;

- 6) kecakapan mengelola raga;
  - 7) kecakapan merumuskan kepentingan dan upaya-upaya untuk mencapainya; dan
  - 8) kecakapan berkeluarga dan sosial.
- b. Kecakapan instrumental meliputi:
- 1) kecakapan memanfaatkan teknologi;
  - 2) kecakapan mengelola sumber daya;
  - 3) kecakapan bekerjasama dengan orang lain;
  - 4) kecakapan memanfaatkan informasi;
  - 5) kecakapan menggunakan sistem;
  - 6) kecakapan berwirausaha;
  - 7) kecakapan kejuruan;
  - 8) kecakapan memilih, menyiapkan, dan mengembangkan karir;
  - 9) kecakapan menjaga harmoni dengan lingkungan; dan
  - 10) kecakapan menyatukan bangsa.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Tadris terhadap kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Bagaimana analisis kurikulum kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
3. Bagaimana analisis hasil kecakapan personal, sosial, akademik dan vokasional berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
4. Bagaimana dampak kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran di jurusan Tadris IPS?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Memperoleh gambaran pemahaman mahasiswa Tadris terhadap kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Mendeskripsikan hasil analisis kurikulum kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Menganalisis hasil kecakapan personal, sosial, akademik dan vokasional berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS di Jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Mengkaji dampak kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran di jurusan Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan teori dan konsep Kecakapan Hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS. Secara praktis, diharapkan sebagai solusi dan alternatif untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran IPS.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam tataran teoretis. Ranah teoretis kecakapan hidup dapat memberi sumbangan pemikiran tentang kajian pembelajaran IPS berbasis kesetaraan gender.

Kajian ini dapat dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya IPS dan dapat dikembangkan di beberapa daerah sesuai dengan kondisi objektif daerah yang bersangkutan sehingga lebih signifikan bagi generasi muda. Penelitian ini juga memberikan gambaran dalam mengkaji kurikulum, proses dan hasil pembelajaran berbasis kecakapan hidup dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan kualitas pembelajaran IPS sebagai bahan perbandingan untuk meneliti kajian sejenis dalam perspektif yang berbeda.

#### **14.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS ini adalah berguna bagi kegiatan pembelajaran di kelas agar tercapai nilai-nilai humanis dan demokrasi serta kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini diharapkan menjadi solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran IPS, di antaranya sebagai berikut.

1. Memecahkan persoalan akibat belum optimalnya kecakapan hidup di kalangan mahasiswa pendidikan IPS
2. Menganalisis kurikulum dan bahan ajar pembelajaran IPS berdasarkan pengembangan kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender.
3. Sebagai model alternatif pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran IPS.

Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk memberi *output*, *outcome* dan proses pembelajaran yang menyadari, memahami, dan melaksanakan konsep kesetaraan dan keadilan gender melalui pembelajaran IPS di kelas atau menghadapi persoalan global di lingkungan luar kelas.

Bagi sekolah dan lembaga pendidikan, penelitian ini menjadi referensi untuk kegiatan pembelajaran IPS, menjadi alat evaluasi antara realitas kehidupan yang dihadapi sekolah sebagai tuntutan pembelajaran yang berpihak pada *gender mainstreaming*.

Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi bahan acuan kurikulum pembelajaran, dan memahami nilai-nilai kemandirian, demokrasi, kesetaraan, dan



keadilan gender, sehingga aplikasi pembelajaran IPS berperspektif gender dengan model penerapan *life skills* mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan masyarakat adil gender yang mandiri.

### **1.5. Struktur Organisasi Disertasi**

Pengorganisasian laporan penelitian ini dimulai dari Bab I (Pendahuluan) yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sebagai acuan untuk pengembangan konsep dan operasionalisasi penelitian yang dilanjutkan dengan Bab II (Landasan Teoretis) dengan mengemukakan berbagai teori dari para pakar yang relevan dengan masalah penelitian sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan untuk menganalisis temuan-temuan penelitian. Bab III (Metode Penelitian) mengemukakan pendekatan dan metode penelitian sebagai acuan untuk memperoleh data dan menganalisis data sehingga data yang didapat memenuhi kriteria penelitian (kualitatif) dengan akurasi meyakinkan untuk pencapaian tujuan penelitian.

Pemaparan pada Bab I, II, dan III menjelaskan segala aspek yang dilakukan penelitian di lapangan yang hasilnya disajikan pada Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) sebagai hasil proses pencarian data dan analisis data dalam bentuk naratif dengan temuan-temuan penelitian yang dibahas dengan teori-teori terkait sehingga diperoleh kecakapan hidup berbasis kesetaraan gender dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik simpulan yang disajikan pada Bab V (Simpulan dan Rekomendasi) dengan mengemukakan rekomendasi sebagai tindak lanjut temuan-temuan penelitian ini yang diakhiri dengan 'pengakuan' peneliti (Keterbatasan Peneliti). Kemampuan yang terbatas dalam penelitian ini menjadikan penelitian ini berposisi penelitian awal yang menghimbau untuk selanjutnya dilakukan penajaman pada kesempatan (penelitian) berikutnya atau melakukan penelitian lanjutan.